

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022

Financial Analysis of the Regional Government of Banggai Islands Regency 2018-2022

Heny Ariwijaya^{1*}, Depianti Nursin², Sri Rahayu Husen², Mario K. Muangi³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tompotika Luwuk

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Tompotika Luwuk

³Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tompotika Luwuk

*¹Email: henyariwijaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2022 dengan menggunakan analisis rasio desentralisasi fiskal, Rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio keserasian, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data deskriptif kuantitatif yang dimaksudkan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal dalam mengelola keuangan daerah. Walaupun dalam realisasi anggarannya sudah efektif serta cukup efisien akan tetapi pertumbuhan pendapatan Asli Daerah hal ini diakibatkan karena prioritas belanja daerah Sebagian besar lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Kata Kunci : Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the Banggai Islands Regency Government for the 2018-2022 period using fiscal decentralization ratio analysis, independence ratio, effectiveness ratio, harmony ratio, efficiency ratio, growth ratio. The type of data used in the study is quantitative descriptive data which is intended to use quantitative data obtained using documentation techniques. The data analysis method uses financial ratio analysis. The results of this study indicate that the Banggai Islands Regency Government has not been optimal in managing regional finances. Although the realization of its budget has been effective and quite efficient, the growth of Regional Original Income is due to the priority of regional spending. Most prioritize operating expenses over capital expenditures.

Keywords: *Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio*

PENDAHULUAN

Pada Era Reformasi telah terjawab persoalan tentang otonomi daerah di Era Orde Baru. Seperti permasalahan desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. otonomi daerah di canangkan di Indonesia sejak tahun 2002 sesuai Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di revisidengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (PEMDA). Penerapan otonomi daerah sangat mempengaruhi perjalanan setiap daerah di indonesia dalam melaksanakan pemerintahan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional.

Otonomi daerah pada dasarnya tidak hanya untuk memberikan hak kepada daerah namun kebijakan ini juga memberikan kewajiban kepala daerah untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah, sehingga daerah diberikan hak untuk mengelola pemerintahan secara mandiri namun tetap berkewajiban untuk melaporkan segala macam transaksi yang dilakukan. Otonomi daerah memiliki dua aspek kinerja keuangan yang dituntut dalam pelaksanaannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi jika dibandingkan dengan sebelum adanya Otonomi Daerah. Pertama, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah dimana pengelolaan keuangan daerah harus lebih baik akuntabel dan transparan sehingga lebih efisien serta efektif khususnya dalam pengeluaran daerah (Lengkong, 2019). Otonomi daerah merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan bersama. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dengan dijalankannya, otonomi daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi dari tiap daerah (Maulina & Rheas, 2019)

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelolah potensi daerah salah satunya diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengukur kemampuannya dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan ini juga dapat dilihat atau dibandingkan atas ketergantungannya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat lebih kecil dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan urusan, kegiatan, dan proyek daerah dalam waktu tertentu. Keuangan daerah yang dapat dilihat dari APBD merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian di wilayahnya. Suatu daerah otonom harus mampu mengelola aset dan keuangan daerahnya tersebut baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan dan belanja daerahnya. Artinya agar suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi basis utama pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat dan provinsi (Ridwanto, dkk., 2024).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numerical* yang diolah dengan metode statistika. Menurut (Sugiono, 2013) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan atau postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rumus kinerja keuangan pemerintah. Proxy derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektivitas, keserasian, dan pertumbuhan (Halim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, pengeluaran, pengeluaran dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut (Rahayu, 2016). Berikut tabel 1 merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang mana data tersebut merupakan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2022.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2018	Pendapatan Daerah	845.452.183.400.00	819.184.420.108.54	96,89
		Belanja Daerah	736.581.195.326.08	674.058.901.133.82	91,51
		Transfer	150.908.931.700.00	150.629.039.070.00	99,81
		Surplus/Defisit	- Rp. 4.203.794.426.08	- Rp. 5.503.520.095.28	130,92
		Pembiayaan	4.203.794.426.08	Rp. 42.037.944.626.08	100
2	2019	Pendapatan Daerah	937.804.725.365.00	910.888.768.858.00	97,13
		Belanja Daerah	804.475.278.050.80	741.897.950.191.09	92,22
		Transfer	166.899.172.300.00	166.759.194.539.00	99,92
		Surplus/Defisit	- 33.569.724.985.80	2.231.624.127.91	- 6,65
		Pembiayaan	33.569.724.985.80	33.569.724.985.80	100,00
3	2020	Pendapatan Daerah	822.803.010.648.00	827.151.804.218.27	100,53
		Belanja Daerah	689.932.010.648.00	644.811.128.881.00	93,46
		Transfer	165.026.386.600.00	164.705.578.182.00	99,81
		Surplus/Defisit	- 32.156.048.658.71	17.635.097.155.27	- 54,84
		Pembiayaan	32.156.048.658.71	32.156.048.658.71	100,00
4	2021	Pendapatan Daerah	850.389.382.552.00	857.381.199.315.34	100,82
		Belanja Daerah	859.758.002.102.00	774.774.900.295.00	90,12
		Surplus/Defisit	- 9.408.619.550.98	82.606.299.020.34	- 877,99
		Pembiayaan	9.408.619.550.98	8.403.857.853.98	89,32
		Pendapatan Daerah	811.623.893.544.00	811.071.133.450.26	99,93
5	2022	Belanja Daerah	744.205.541.018.00	663.971.222.937.43	89,22
		Transfer	155.068.509.400.00	154.505.385.371.00	99,64
		Surplus/Defisit	- 87.650.156.874.00	- 7.405.474.858.17	8,45
		Pembiayaan	87.650.156.874.00	87.656.990.071.66	100,01

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat laporan realisasi anggaran dan setelah dianalisis secara seksama ditemukan bahwa anggaran Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2018 mengalami *Defisit* sedangkan di tahun 2019-2021 daerah ini mengalami *Surplus* dan di tahun 2022 daerah ini kembali mengalami *defisit*. Perlu diketahui bahwa *Surplus* tidak selalu merupakan kelebihan kas yang dimiliki daerah, akan tetapi dapat juga berarti Pendapatan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Maulina & Rhea, 2019), yang nampak pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun Anggaran	Keterangan	PAD	Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
1	2018	Anggaran	25.788.050.400.00	845.452.183.400.00	3.05%
		Realisasi	23.922.244.075.54	819.184.420.108.54	2.92%
2	2019	Anggaran	31.558.305.280.00	937.804.725.365.00	3.37%
		Realisasi	34.231.612.395.00	910.888.768.858.00	3.76%
3	2020	Anggaran	34.012.039.869.00	822.803.010.648.00	4.13%
		Realisasi	36.213.33.404.27	827.151.804.218.27	4.38%
4	2021	Anggaran	34.802.251.751.00	850.389.382.552.00	4.09%
		Realisasi	33.630.889.775.34	857.381.199.315.34	3.92%

5	2022	Anggaran	32.525.500.000.00	811.623.893.544.00	4.01%
		Realisasi	33.146.420.283.26	811.071.133.450.26	4.09%
Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal					3.81%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan anggarannya, Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD dalam membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dari Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan. 2,92% pada Tahun 2018, 3,76% pada Tahun 2019, 4,38% pada Tahun 2020, sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan 3,09%, dan meningkat Kembali pada Tahun 2022 sebesar 4,09% dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 3,81%.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber dana ekstern) (Keintjem et al., 2019). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah seperti pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Rasio Kemandirian Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun Anggaran	Keterangan	PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
1	2018	Realisasi	Rp. 23.922.233.075.54	3.08%
2	2019	Realisasi	Rp. 34.231.612.395.00	4.04%
3	2020	Realisasi	Rp. 36.213.331.404.27	4,75%
4	2021	Realisasi	Rp.33.630.899.775.34	4.19%
5	2022	Realisasi	Rp. 33.146.420.283.26	4.39%
Rata-Rata				4%

Hasil penghitungan rasio kemandirian pada tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kemandirian yang tidak begitu signifikan yaitu di Tahun 2018 realisasi 3,08%, pada Tahun 2019 Realisasi 4,04%, pada Tahun 2020 4,75%, pada Tahun 2021 4,19%, dan pada Tahun 2022 4,39% dengan nilai rata-rata 4%. Dari hasil tersebut yakni pada Tahun 2018-2022 terdapat peningkatan secara lambat, dalam melihat tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pedoman dalam melihat pola hubungan dan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat kita lihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pola Hubungan Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian(%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Istruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tingkat kemandiriannya dalam kemampuan keuangannya sangat rendah atau dalam Pola hubungan tergolong dalam kategori Instruktif yang mana ditemukan bahwa daerah Kabupaten Banggai masih dalam arahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis rasio kemandirian yakni tingkat kemandirian Kabupaten Banggai Kepulauan hanya mencapai 4% selama 5 Tahun yaitu pada tahun 2018-2022.

Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Rahman et al., 2022). Menurut (Suyana Utama, 2019), rasio efektifitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam suatu persen rasio efektivitas. Terlihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Rasio Efektivitas

N o	Tahun Anggaran	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Derajat Desentralisasi Fiskal
1	2018	Pendapatan Daerah	Rp. 845.452.183.400.00	Rp. 819.184.420.108.54	96.89%
2	2019	Pendapatan Daerah	Rp. 937.804.725.365.00	Rp. 910.888.768.858.00	97,13%
3	2020	Pendapatan Daerah	Rp. 822.803.010.648.00	Rp. 827.151.804.218.27	100,53
4	2021	Pendapatan Daerah	Rp. 850.389.382.552.00	Rp. 857.381.199.315.34	100,82%
5	2022	Pendapatan Daerah	Rp. 811.623.893.544.00	Rp. 811. 071.133.450.26	99,93
Rata-Rata					99.06%

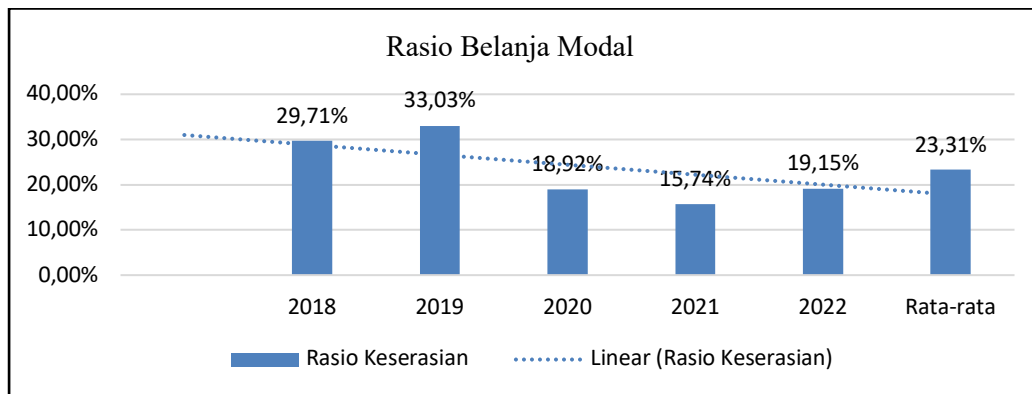
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pada periode Tahun 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merealisasikan anggaran sebesar 99,06%. Pada realisasi ini sudah sepatutnya serta menjadi tugas untuk Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan atau meralisasikan anggaran daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Undang-undang yang telah di canangkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Rasio Kerasasian

Rasio Kerasasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja pembangunan secara optimal (Ridwanto, 2021). Dalam analisis kerasasian dibagi menjadi dua yaitu Rasio Kerasasian Belanja Modal dan Rasio Kerasasian Belanja Operasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 5 tahun berturut-turut Periode Tahun 2018- 2022.

1) Rasio Kerasasian Belanja Modal

Rasio kerasasian belanja modal yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal yang dibagi dengan total belanja daerah Pemerintah Daerah bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang sama (Riswati & Bukhori, 2023). Perhitungan rasio dilakukan dengan membandingkan antara Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2022, perhitungannya dapat di lihat pada gambar 1 berikut.

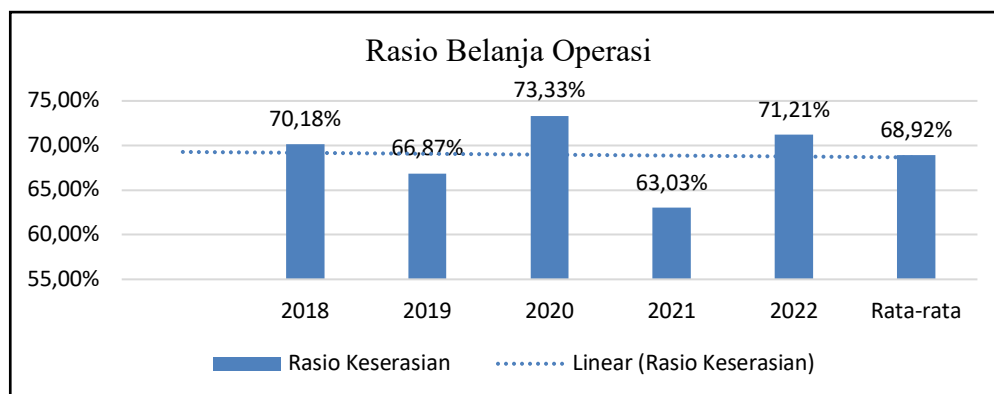


Gambar 1. Kesenjangan Rasio Belanja Modal Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa Belanja Modal Pemerintah daerah tersebut pada periode 2018-2022 sebesar 23,31%. yaitu pada tahun 2018 sebesar 29,71%, 33,03% tahun 2019, 18,92% tahun 2020, 15,74% pada tahun 2021, dan 19,15% pada tahun 2022.

2) Rasio Kesenjangan Belanja Operasi

Pada perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2022, perhitungannya dapat di lihat pada gambar 2 berikut :



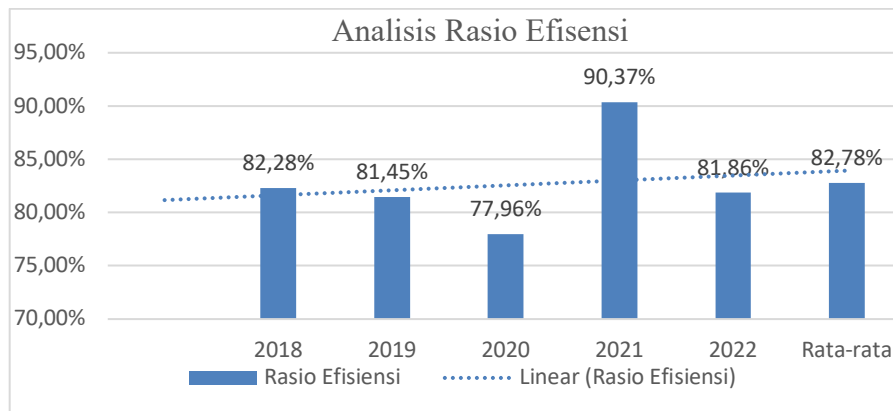
Gambar 2. Hasil Analisis Rasio Belanja Operasi

Berdasarkan gambar 2 diatas menunjukkan bahwa rasio belanja modal kabupaten banggai kepulauan dari tahun 2018 sebesar 70,18% dan tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 66.87% dan. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 73,33% dan tahun 2021 terjadi penurunan kembali sebesar 63,03%, Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 71,21% . Dalam melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan alat analisis rasio kesenjangan ditemukan bahwa belanja modal Kabupaten Banggai Kepulauan lebih besar (23,31%) dari pada Belanja operasi (68,92%).

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target yang telah (Sururi, 2022). Ketika rasio pemungutan pendapatan pemerintah daerah kurang dari seratus persen, hal ini dianggap efisien. Kinerja yang dicapai semakin baik jika rasio efisiensi semakin rendah. Menurut (Hadinata et al., 2024) rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang

dikeluarkan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Hasil perhitungan dari Rasio Efisiensi dapat dilihat pada gambar 3 berikut :



Gambar 3. Hasil Analisis Rasio Efisiensi

Berdasarkan data pada gambar 3 diatas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2022 mengalami ketidakstabilan kenaikan, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 90,37% sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 77,96%. Meskipun terjadi penurunan, apabila dilihat secara umum, Rasio efisiensi masih termasuk ke dalam kategori “kurang efisien” dimana pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam melakukan biaya yang sangat besar dalam melakukan pemungutan pendapatan. Total pendapatan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rata-rata selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata total sebesar 82,78%. meskipun demikian, kenaikan total pendapatan selalu diikuti dengan kenaikan total belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu untuk memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas pemerintahan dan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel 6 dibawah.

Tabel 6. Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi Dan Kemampuan Keuangan		Rasio Efisiensi
Sangat Efisiensi		<=60
Efisiensi		>60-80
Cukup Efisiensi		>80-90
Kurang Efisiensi		>90-100
Tidak Efisiensi		>=100

Dari keterangan pada tabel 6 di atas menjelaskan bahwa kebijakan pemda Kabupaten Banggai Kepulauan masih kurang Efisien, yang mana rata-rata hasil perhitungan (dengan menggunakan rasio efisiensi) kebijakan keuangan Pemda tersebut adalah 82,78%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan capaian dari pada pemerintah (Halim,2012). Dalam melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Rasio pertumbuhan di bagi menjadi tiga bagian yaitu, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah.

1) Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian/kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan periode sebelumnya (Ulum, 2012) dalam (Fakhrudin et al., 2024). Pada perhitungan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Penerimaan PAD tahun yang akan dihitung yang dikurangi Realisasi Penerimaan PAD Tahun sebelumnya dengan Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya, dengan data Laporan Realisasi Anggaran selama 5 tahun berturut-turut yaitu Periode tahun 2018-2022. Berikut penyajian pada tabel 7.

Tabel 7. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun Anggaran	Keterangan	Xn	Xn-1	$\frac{Xn - Xn-1}{Xn - 1}$
1	2018	Realisasi Pertumbuhan PAD	Rp. 23.992.233.075.54	Rp. 40.841.502.554.46	- 41.43%
2	2019	Realisasi Pertumbuhan PAD	Rp. 34.231.612.395.00	Rp. 23.922.233.075.54	43.10%
3	2020	Realisasi Pertumbuhan PAD	Rp. 36.213.331.404.27	Rp. 34.231.612.395.00	5.79%
4	2021	Realisasi Pertumbuhan PAD	Rp. 33.630.899.775.34	Rp. 36.213.331.404.27	- 7.13.%
5	2022	Realisasi Pertumbuhan PAD	Rp. 33.146.420.283.26	Rp. 33.630.899.775.34	-1.44%
Rata-Rata					-0.22%

Dari hasil perhitungan pada tabel 7 di atas menggambarkan pertumbuhan realisasi penerimaan PAD daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mana pada tahun 2018 realisasi Penerimaan PAD menurun secara signifikan yaitu -41,43%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 43,20%, di tahun 2020 sebesar 5%, sedangkan pada 3 tahun berikutnya mengalami penurunan Kembali secara signifikan yaitu, -7,13% pada tahun 2021, -1,44% pada tahun 2022. Dan dari hasil tersebut di rata-ratakan menjadi -0,22%.

2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pada perhitungan ini dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi pendapatan tahun yang akan dihitung yang telah dikurangi dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya selama 5 tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2018-2022 yang dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun Anggaran	Keterangan	Xn	Xn - 1	$\frac{Xn - Xn-1}{Xn - 1}$
1	2018	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan	Rp. 845.452.183.400.00	Rp. 764.650.292.158.46	10,57%
2	2019	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan	Rp.937.804.725.365.00	Rp. 845.452.183.400.00	10.92%
3	2020	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan	Rp.822.803.010.648.00	Rp. 937.804.725.365.00	- 12,26%
4	2021	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan	Rp.850.389.382.552.00	Rp. 822.803.010.648.00	3.35%
5	2022	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan	Rp. 811.623.893.544	Rp. 850.389.382.552.00	- 4,56 %
Rata – Rata					1.60%

Dari hasil perhitungan pada tabel 8 di atas menggambarkan bagaimana pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018-2022. Terdapat peningkatan pendapatan Pada tahun 2018 10,57%, pada tahun 2019 10,92%, dan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 yaitu -12,26%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,35%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar -4,56%. Pada hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan bila di rata-ratakan menjadi 1,60%.

3) Rasio Pertumbuhan Belanja

Pada perhitungan ini dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi Belanja tahun yang akan di hitung yang telah di kurangi dengan Realisasi Belanja tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Perhitungan ini berlandaskan data LRA selama 5 tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2018-2022.

Tabel 9. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun Anggaran	Keterangan	Xn	Xn - 1	$\frac{Xn - Xn^{-1}}{Xn^{-1}}$
1	2018	Reaksi Pertumbuhan Belanja	Rp. 674.058.901.133.82	Rp. 658.567.913.712.00	2.35%
2	2019	Reaksi Pertumbuhan Belanja	Rp. 741897.950.191.09	Rp. 674. 058.901.133.82	10,06%
3	2020	Reaksi Pertumbuhan Belanja	Rp. 644.811.128.881.00	Rp. 741.897.950.191.09	- 13.09%
4	2021	Reaksi Pertumbuhan Belanja	Rp.774. 774.900.295.00	Rp. 644. 811.128.881.00	20.16%
5	2022	Reaksi Pertumbuhan Belanja	Rp. 663.971.222.937.43	Rp. 774.774.900.295.00	- 14.30%
Rata-Rata					1.04%

Dari hasil perhitungan pada tabel 9 di atas menggambarkan bagaimana pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 Belanja daerah sebesar 2,35% dari tahun 2017, pada tahun 2019 10,06%, dan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 yaitu - 13,09%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan belanja sebesar 20,16%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar -14,30%. Pada hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan bila di rata-ratakan menjadi 1,04%.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum maksimal dikarenakan pemerintah daerah ini masih bergantung dengan kontribusi keuangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini di lihat bagaimana kontribusi PAD terhadap total penerimaan dengan rata-rata kontribusi PAD sebesar 3,81% selama Periode Tahun 2018-2022.
2. Tingkat Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode Tahun 2018-2022 berada pada tingkat kemandirian Sangat Rendah. Hasil tersebut dikarenakan dalam pembiayaan kegiatan daerah masi sangat bergantung pada kontribusi keuangan serta arahan dari pemerintah Pusat atau Provinsi.
3. Tahap realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada periode tahun 2018-2022 sudah baik. Hasil ini menggambarkan capaian realisasi pendapatan daaerah ini sebesar dengan nilai rata-rata 99,06%.
4. Pada rasio keserasian lebih memprioritaskan Belanja Operasional dari pada Belanja Operasional. Hal ini dilihat dari hasil analisis rata-rata belanja lebih besar Belanja Operasional sebesar 68,92% di bandingkan Belanja Modal sebesar 23,31%.

5. Secara keseluruhan efisiensi dari pada realisasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada tingkat Cukup Efisien. Hal ini di ketahui dari hasil analisis dengan nilai rata-rata 82,78% selama periode tahun 2018-2022.
6. Nilai rata-rata Pertumbuhan PAD rata-rata -0,22%, Pertumbuhan Pendapatan 1,60%, dan Pertumbuhan Belanja 1,04%.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, I., Saputra, B. Y., & Firdaus, F. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis. *Analisis*, 14(01), 1–15. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3192>
- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. enjelina, & Tambunan, N. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 496–502.
- Halim Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja* (4th ed., Vol. 8, Issue 2). Salemba Empat. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Keintjem, V. A., Murni, S., Saerang, I. S., Keintjem, V. A., Murni, S., & Saerang, I. S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019. *Junal Emba*, 10(33), 953–962.
- Lengkong. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, IPDN). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22. <https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(01). <https://doi.org/10.36467/makro.2016.01.01.05>
- Rahman, K. G., Permatasari, Y., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 1*. 1(2), 44–53.
- Ridwanto. (2021). *Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur*). 1(3), 49–64. <https://doi.org/10.47647/MAFEBIS.v2i2.590>
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41–55. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sururi. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 127–135. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6300>
- Utama, M. S. (2019). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Provinsi Bali Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Pendahuluan Keberhasilan Pembangunan Yang Dilaksanakan Oleh Sebuah Negara Termasuk Negara Indo. 7, 651–680.